

Strategi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

¹Rosa Kartika Ayu, ²Umi Oktyari Retnaningsih, ³Wazni

^{1,2,3}Universitas Riau

Korespondensi : rosakartika12@student.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan stunting dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menurunkan prevalensi stunting. Penelitian ini menggunakan pertama, data primer yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun informasi yang diperlukan guna untuk penelitian dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatif. Kedua, data sekunder adalah literatur, media cetak, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melengkapi data primer. Informan penelitian staff Dinas Kesehatan, Staff UPT Puskesmas, Kader dan ibu dari anak stunting. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dengan mengukuhkan lurah sebagai bapak asuh dan ibu lurah sebagai bunda asuh di tingkat Kelurahan/desa sudah berjalan secara optimal, kader dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan kepada anak di Posyandu. Strategi yang dibuat melalui 5 strategi menurut Geof Mulgan yaitu (1) tujuan untuk memperbaiki gizi anak dan tumbuh kembang anak, (2) lingkungan terdiri dari lingkungan external dan internal, (3) Arahan meliputi perintah dari atasan, regulasi, dan koordinasi melalui forum. (4) Tindakan strategi yang di ambil adalah menerapkan program Bapak Bunda asuh dan intervensi Spesifik (5) Evaluasi dilaksanakan melalui mini lokakarya 3 bulan sekali tingkat kecamatan dan 6 bulan sekali untuk tingkat Kabupaten. Namun, faktor lain yang menyebabkan terjadinya stunting di Kecamatan Reteh berdasarkan kerangka Sound Governance, kualitas sistem tata kelola ditentukan oleh interaksi dinamis antara sepuluh dimensi. Khususnya pada dimensi proses dan struktur, yang menghambat penurunan stunting di Kelurahan Pulau Kijang dan Madani.

Kata kunci: strategi, stunting, sound governance, kondisi sosial dan ekonomi

Abstract

This study aims to explain the factors causing stunting and the strategies implemented by the Health Office of Indragiri Hilir Regency to reduce the prevalence of stunting. This research uses, first, primary data, namely informants' responses regarding data and information needed for the study through in-depth interviews and non-participatory observation. Second, secondary data were obtained from literature, printed media, books, and applicable laws and regulations to complement the primary data. The research informants included Health Office staff, Community Health Center staff, cadres, and mothers of stunted children. The results of the study show that the strategy implemented, namely the Foster Father/Mother for Stunted Children Program (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting), by appointing village heads as foster fathers and the wives of village heads as foster mothers at the village level, has been running optimally. Cadres and the community feel helped by this program, especially in providing supplementary feeding activities for children at Posyandu. The strategy was developed through five strategies according to Geoff Mulgan, namely: (1) goals aimed at improving children's nutrition and growth and development; (2) the environment consisting of both external and internal environments; (3) direction, including instructions from superiors, regulations, and coordination through forums; (4) strategic actions taken by implementing the Foster Father/Mother Program and specific interventions; and (5) evaluation carried out through mini workshops every three months at the district level and every six months at the regency level. However, other factors causing stunting in Reteh District, based on the Sound Governance framework, indicate that the quality of the governance system is determined by the dynamic interaction among ten dimensions. In particular, the dimensions of process and structure hinder the reduction of stunting in Pulau Kijang Village and Madani Village.

Keyword: strategy, stunting, sound governance, social and economic conditions

1. PENDAHULUAN

Millennium Development Goals (MDGs) adalah visi pembangunan global yang diperkenalkan dalam konferensi perserikatan bangsa-bangsa di New York pada tahun 2000. Setiap Negara yang ikut pada pertemuan tersebut berkomitmen untuk memasukkan MDGs ke dalam program pembangunan nasional guna mengatasi isu penting. Deklarasi MDGs merupakan hasil kolaborasi dan kesepakatan antara Negara-negara yang sudah berkembang dan yang sedang berkembang. Untuk Negara yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab melaksanakan tujuan MDGs tersebut, sedangkan Negara yang sudah maju memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan demi tercapainya tujuan dan target MDGs pada tahun 2015 (Darwin, 2013)

MDGs akan berakhir pada tahun 2015, dan rencana dari MDGs akan terus berlanjut dengan pelaksanaan lebih menekankan pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya sebuah konsep diciptakan pada agenda pembangunan setelah tahun 2015 MDGs berakhir dinamakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan konsep baru dan sangat penting untuk program pembangunan baru yang muncul perubahan setelah tahun 2015. SDGs mencakup berbagai masalah terkait sosial ekonomi seperti di antaranya ada masalah kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Pada bulan Juli 2014, sebuah kelompok yang terdiri dari 30 anggota Majelis Umum PBB dikenal sebagai kelompok kerja terbuka diberikan tugas untuk menyusun dokumen mencakup 17 tujuan untuk diajukan dan disetujui oleh Majelis Umum pada September 2015. Dokumen tersebut menjadi pondasi bagi SDGs berlaku dari tahun 2015 sampai 2030.

Istilah SDGs ini bukanlah suatu hal yang asing di Indonesia, isu-isu global yang dijadikan fokus oleh SDGs sudah lama menjadi bagian dari cita-cita Indonesia. Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional juga sama dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian, komitmen Indonesia dalam mewujudkan SDGs bukan sekedar ikut memenuhi kesepakatan global, tetapi juga bagian dari mewujudkan aspirasi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDGs adalah tujuan bersama yang dalam pemcapaiannya tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah saja melainkan dibutuhkan pendekatan multi-disiplin berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, LSM, sector swasta dan masyarakat. Sasaran kedua dari SDGs adalah mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi bagi remaja, ibu hamil dan menyusui, termasuk stunting dan wasting pada anak-anak dibawah lima tahun.

Gizi adalah faktor krusial dalam kesehatan dan pertumbuhan anak-anak dibawah lima tahun. Meningkatnya gizi secara langsung pada anak berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan anak dan ibu. Jika daya tahan tubuh membaik maka mengurangi risiko penyakit menular, kemahilan dan persalinan lebih sehat. Begitupun hal yang serupa terjadi pada anak-anak dalam keadaan sehat cukup gizinya maka cenderung memiliki kemampuan berpikir dan belajar lebih baik.

Stunting merupakan permasalahan dalam tumbuh dan kembang anak akibat kekurangan asupan gizi yang buruk, dan adanya infeksi secara berulang. Stunting ini mulai muncul sejak fase awal kehamilan hingga 1000 hari kehidupan. Stunting ini menyebabkan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan kerugian pada anak termasuk menurunnya kemampuan kognitif dan berkurangnya produktivitas. Kurang berkembang anak pada usia 0-5 tahun disebabkan rendahnya asupan penyerapan gizi dalam waktu panjang yang mempengaruhi 1000 hari kehidupan anak.

Pertumbuhan pada anak menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko kematian, penyakit menular, dan kemampuan belajar yang kurang produktivitas. Penyebab utama dari stunting adalah kekurangan asupan gizi pada makanan tidak merangsang pertumbuhan pada 1000 hari kehidupan. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan

BB/TB. Untuk menilai status gizi balita, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Zscore) menggunakan baku antropometri balita. Selanjutnya berdasarkan nilai Zscore dari masing-masing indikator tersebut ditentukan status gizi balita (Trihono & dkk, 2015).

Stunting merupakan masalah yang serius dialami oleh anak Indonesia. Menurut Unicef dan WHO prevalensi stunting di Indonesia berada urutan ke-5 seAsia, artinya memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Indonesia. Pencegahan stunting menjadi masalah prioritas nasional dari setiap tingkatan pemerintah nasional sampai pada tingkat daerah. Jika tidak segera ditangani menjadi ancaman bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan.

Indonesia sebagai Anggota PBB bersama 192 negara lain ikut mengimplementasikan program dari SDGs ini, yang berfungsi untuk program pembangunan berkelanjutan. Terjadinya stunting menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia untuk melaksanakan penurunan prevalensi stunting. Indonesia tercatat sebagai Negara dengan tingkat stunting tergolong tinggi dibandingkan Negara berkembang lainnya. Berdasarkan laporan dari Studi Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, tingkat stunting di Indonesia tercatat sebanyak 27,7% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 24,4% pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 21,6%. Meskipun terus mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah stunting ini belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh WHO, yaitu menargetkan 14% (Lestari, 2023)

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencapai penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, dengan sasaran pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menetapkan pendekatan nasional untuk mempercepat penurunan stunting dengan tujuan mengurangi jumlah stunting, meningkatnya kualitas kehidupan keluarga, menjamin pemenuhan kebutuhan gizi, dan memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berbagai upaya percepatan penurunan stunting ini dijalankan oleh seluruh pihak kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di landasi oleh adanya system pemerintah desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih besar dalam mengelola dan mengembangkan wilayah sesuai dengan kebutuhan dan potensi local dari kabupaten/kota. Proses desentralisasi diiringi dengan penerapan otonomi daerah yang memberikan hak lebih luas kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat. Untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rencana strategi Dinas Kesehatan tahun 2023 mempunyai program, kegiatan, dan pendanaan terkait program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan dana sebesar Rp. 25.657.000 dan program kedua adalah program upaya Kesehatan masyarakat dengan kegiatan peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak dengan pendanaan sekitar Rp. 96.358.400. Program dari upaya Kesehatan masyarakat dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) mempunyai tujuan menurunkan angka kematian bayi/ibu stunting melalui kegiatan pemeriksaan kehamilan rutin, kelas ibu hamil, imunisasi dasar, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, pemberian makanan tambahan dan penyuluhan tentang gizi dan KB.

Kemudian program kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi artinya keluarga yang mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi pada anggota keluarganya dengan kegiatan seperti pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, sosialisasi dari kader mengenai MPASI dan Asi Eksklusif, dan memberikan pelatihan kepada Ibu-ibu tentang mengolah makanan local menjadi menu yang bergizi seimbang. Keluarga beresiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting. Faktor risiko stunting yang mempengaruhi terjadinya

stunting yaitu sanitasi, akses air bersih, dan kondisi 4T (terlalu muda,terlalu tua, terlalu banyak). Berikut ini terdapat keluarga sasaran yang tidak memiliki air minum layak dan sanitasi air bersih di Provinsi Riau.

Tabel 1. Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama Yang Layak dan Keluarga Tidak Mempunyai Jamban Yang Layak di Provinsi Riau tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama Yang Layak	Keluarga Tidak Mempunyai Jamban Yang Layak
1	Kampar	3.189	13.634
2	Indragiri Hulu	2.780	7.017
3	Bengkalis	20.395	11.460
4	Indragiri Hilir	58.442	33.709
5	Pelalawan	3.089	8.982
6	Rokan Hulu	4.028	9.275
7	Rokan Hilir	19.426	19.962
8	Siak	3.304	4.307
9	Kuantan Singingi	2.401	5.955
10	Kepulauan Meranti	22.576	10.866
11	Pekanbaru	459	8.719
12	Dumai	655	3.183

Sumber : Laporan TPPS Provinsi Riau Semester I

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten tertinggi yang tidak mempunyai sumber air minum yang layak ada pada Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 58.442 keluarga dan tertinggi keluarga tidak mempunyai jamban yang layak sebanyak 33.709 keluarga. Kebutuhan keluarga yang paling utama adalah sumber air yang layak dimana sumber air yang layak sangat berkaitan erat dengan Penurunan dan pencegahan stunting, karena air yang tercemar akan menueubakkan diare dan infeksi berulang dapat menghambat pertumbuhan penyerapan 1000 hari pertama kehidupan. Begitupun kondisi jamban yang layak juga berkaitan erat dengan pertumbuhan anak, karena jamban yang tidak layak/burukk bisa menyebabkan infeksi cacing dan menghambbaat penyerapan gizi pada anak.

Pemerintah Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2023 menjadi 13,6 %. Hal ini menempatkan Riau berada pada urutan 3 terbesar terendah di Indonesia. Berikut ini tabel rincian stunting di Provinsi Riau.

Tabel 2. Prevalensi Stunting Di Provinsi Riau

No	Provinsi	Tahun	Jumlah Balita	Stunting		Persentase Kasus Stunting (%)
				Pendek	Sangat Pendek	
1	Riau	2022	418,300	13,280	4,152	4.2
2		2023	373,092	8,376	2,678	3.0

Sumber : Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah- Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel diatas terlihat bahwa Provinsi Riau mengalami penurunan persentase balita stunting setiap tahunnya dari angka 4.2% tahun 2022, kemudian 3.0% tahun 2023. Provinsi Riau mengikuti Gerakan Intervensi Serentak dengan melibatkan unsur TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)

Provinsi sampai dengan TPPS di tingkat desa, Puskesmas, Posyandu dan seluruh stekholder lainnya. Adapun data stunting masing-masing kabupaten di Provinsi Riau berikut ini :

Tabel 1. Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Kota Provinsi Riau 2023

No	Kabupaten/Kota	SSGI 2022	SSGI 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Kuantan Singingi	17.80	23.00	5.20
2	Indragiri Hulu	16.70	12.70	-4.00
3	Indragiri Hilir	28.50	18.80	-9.70
4	Pelalawan	11.20	10.10	-1.10
5	Siak	22.00	10.40	-11.60
6	Kampar	14.50	7.60	-6.90
7	Rokan Hulu	22.00	15.90	-6.10
8	Bengkalis	8.40	17.90	9.50
9	Rokan Hilir	14.70	16.60	1.90
10	Kepulauan Meranti	17.50	19.60	2.10
11	Pekanbaru	16.80	8.70	-8.10
12	Dumai	12.80	14.90	2.10
	JUMLAH	17.00	13.6	

Sumber : Laporan TPPS Provinsi Riau Semester I

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau merupakan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi dari 12 (dua belas) Kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau dengan jumlah Prevalensi tahun 2022 sebesar 28.50 % kemudian pada tahun 2023 mengalami Penurunan menjadi 18.80%. Penentuan kabupaten/kota prioritas percepatan penanganan stunting ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/kota Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

Berdasarkan hasil aplikasi elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) angka stunting di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 berdasarkan jumlah bayi yang ditimbang 55.14% jumlah stunting sebesar 2.39%. Menanggapi permasalahan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang memiliki 5 pilar pertama, komitmen dan visi bupati, pimpinan PD, pimpinan instansi/organisasi masyarakat. Kedua kampanye dan komunikasi perubahan perilaku. Ketiga, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa. Keempat, gizi dan ketahanan pangan, kemudian yang terakhir adalah pemantuan dan evaluasi yang dilaksanakan melalui kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengadakan Rembuk Stunting dengan menetapkan 40 lokus desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitive dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:Kpts.396/VI/HK-2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023.

Penetapan lokasi desa yang mengalami stunting didasarkan pada total keluarga yang berisiko terkena stunting serta jumlah bayi yang terkena stunting di area kelurahan/desa dengan jumlah anak diukur dengan TB/U stunting tinggi dan pelayanan yang sangat minim. Di desa dan kelurahan yang mengalami stunting, dilaksanakan intervensi bersifat sensitive dan spesifik akan dilaksanakan oleh

pemerintah terkait. Dari tabel di atas tergambar bahwa lokasi terbanyak pada di Kecamatan Reteh Kelurahan Pulau Kijang dan terendah pada Kelurahan Madani.

Beberapa program telah dilaksanakan di Kecamatan Reteh dengan acuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 yaitu program yang pertama pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kegiatan sadar gizi dengan kegiatan pertama pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu masyarakat masih kurang berpartisipasi dengan alasan kondisi jalan dari rumah keposyandu rusak/becek, kegiatan kedua sosialisai dari Puskesmas kepada kader sudah terlaksanakan hanya saja sosialisasi di posyandu ibu-ibu kesulitan memahami Ketika kegiatan posyandu kadang anak-anak rewel konsentrasipun berkurang. Begitupun kegiatan sosialisasi mengolah makanan lokal menjadi makanan gizi seimbang dari masyarakat kurang mengikuti.

Dengan belum berjalannya beberapa program diatas menyebabkan jumlah anak stunting di Kelurahan Pulau Kijang tertinggi dan Kelurahan Madani terendah. Selain itu permasalahan stunting ini bukan masalah yang bisa diabaikan. Anak stunting Akan memberikan pengaruh Jangka Panjang terhadap tumbuh kembang anak. Penanganan stunting ini membutuhkan pendekatan yang berbasis data, dengan melibatkan berbagai sektor seperti Dinas Kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan strategi dengan menyelenggarakan program yang dapat menangani stunting khususnya di Kecamatan Reteh yaitu program Bapak Bunda Asuh (BAAS), sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Pusat Dan daerah kepada Kelurahan/desa. Agar program ini berjalan dengan efektif pemerintah berkolaboratif dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan (Posyandu). Program yang dijalankan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi di Posyandu kepada anak stunting dengan anggaran dana dari Bapak Asuh sebesar Rp. 50.000 setiap bulan posyandu di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani, namun anggaran ini berasal dari dana pribadi lurah.

Minimnyaa anggaran dana pada kegiatan posyandu di Kelurahan Madani dan Keluraha Pulau Kijang menyebabkan partisipasi masyarakat kurang dan juga akses jalan ke lokasi sangat buruk bagi ibu-ibu yang mempunyai rumah di darat. Kemudian akses jalan juga menjadi penghambat pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kesehatan dalam proses pemberian bantuan, sosialisasi, dan pelatihan kepada kader yang ada di Kecamatan Reteh.

Program BAAS yang kedua adalah penyediaan jamban sehat dan akses air bersih bagi keluarga berisiko stunting yang belum Ada bantuan sanitasi dan MCK dari Dinas terkait dan puskesmas sendiri. Dari pemerintah setempat hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait jamban sehat dan membentuk arisan yang dibuat oleh pihak puskesmas dan dibantu pihak Kelurahan. Tidak diberikan unsur paksaan untuk mengikuti arisan kepemilikan jamban sehat. Artinya komunikasi dan komitmen pemerintah antar masyarakat masih kurang yang menyebabkan jumlah stunting bertambah dan tidak ada mengalami pengurangan.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa upaya strategis untuk mempercepat penurunan stunting di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar stakeholder seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah kelurahan/desa, kader Posyandu, dan masyarakat agar program penurunan stunting berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) perlu dioptimalkan melalui peningkatan dukungan anggaran serta keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sehingga kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) dapat berjalan secara rutin dan merata. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI, sanitasi sehat, dan pemantauan tumbuh kembang anak kepada masyarakat. Perbaikan akses sanitasi, penyediaan air bersih, dan pembangunan jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting juga menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko penyakit infeksi pada

anak. Di samping itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu, perbaikan akses jalan menuju fasilitas kesehatan, serta penguatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan secara berkala diharapkan dapat mendukung efektivitas program percepatan penurunan stunting.

Tujuan kegiatan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Reteh, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di wilayah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam membantu penurunan prevalensi stunting, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program penurunan stunting, serta memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) mampu membantu menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Reteh. Selain itu, faktor sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sanitasi dan akses air bersih, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai gizi diduga menjadi penyebab utama terjadinya stunting di Kecamatan Reteh. Penelitian ini juga menduga bahwa kurang optimalnya koordinasi antar stakeholder dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Semakin baik pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan pemerintah, maka semakin besar keberhasilan dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, serta kondisi yang terjadi di lapangan terkait permasalahan stunting di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan proses pelaksanaan program penanganan stunting.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Reteh, khususnya di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani. Objek penelitian meliputi program percepatan penurunan stunting, pelaksanaan Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, sanitasi, dan partisipasi masyarakat yang memengaruhi terjadinya stunting. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka stunting di wilayah tersebut serta menjadi lokus penanganan stunting pada tahun 2023. Penelitian dilakukan selama empat bulan, yaitu pada bulan Oktober, November, Desember 2024 dan Januari 2025. Pemilihan waktu penelitian tersebut dilakukan agar peneliti memiliki kesempatan yang cukup dalam melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan stunting di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tenaga kesehatan UPT Puskesmas Pulau Kijang, lurah, kader Posyandu, sekretaris camat, serta ibu yang memiliki anak stunting di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang yang dinilai mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Bahan penelitian yang digunakan berupa dokumen, laporan, data stunting, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta arsip yang berkaitan dengan penurunan stunting. Alat utama penelitian meliputi pedoman wawancara, alat tulis, telepon genggam sebagai alat perekam suara dan dokumentasi, serta buku catatan lapangan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara selama penelitian berlangsung. Penggunaan alat-alat tersebut bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh data yang akurat dan mendukung proses analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai strategi percepatan penurunan stunting dan faktor penyebab stunting. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi masyarakat, pelaksanaan Posyandu, sanitasi lingkungan, serta kegiatan penanganan stunting tanpa terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan, foto kegiatan, dokumen resmi, arsip, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh disederhanakan dan dipilih sesuai fokus penelitian pada tahap kondensasi data. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya mengenai strategi percepatan penurunan stunting serta faktor penyebab stunting di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Stunting

Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab stunting di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan (*governance*), pola komunikasi, budaya pengasuhan, kondisi sosial ekonomi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Berdasarkan pendekatan *Sound Governance*, terdapat beberapa dimensi yang memengaruhi efektivitas penanganan stunting di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani.

a. Dimensi Proses

Dimensi proses menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting belum berjalan optimal. Sosialisasi mengenai stunting masih dilakukan secara tidak terbuka karena adanya kekhawatiran kader posyandu terhadap respons masyarakat. Kader lebih memilih menggunakan istilah yang lebih halus dibandingkan menyampaikan kondisi stunting secara langsung kepada orang tua balita.

Salah satu kader posyandu menyampaikan:

“Kalau disini kami mensosialisasikan anak kurang berat badannya tidak menyebutkan langsung stunting atau anak kurang gizi, karena takut ibunya tersinggung dan tidak mau datang lagi ke posyandu.”

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting. Sebagian ibu balita bahkan tidak memahami pengertian stunting maupun dampaknya terhadap pertumbuhan anak. Salah satu informan menyatakan:

“Apa itu stunting, kak? Perasaan saya di posyandu tidak ada sosialisasi tentang stunting.”

Temuan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi publik belum bersifat edukatif dan partisipatif. Pemerintah dan kader lebih mengutamakan kenyamanan psikologis masyarakat dibandingkan membangun kesadaran kritis terkait bahaya stunting. Akibatnya, masyarakat tidak memahami urgensi permasalahan sehingga perubahan perilaku kesehatan sulit tercapai.

Selain itu, proses pemberdayaan masyarakat dalam program sanitasi juga belum berjalan maksimal. Program arisan jamban yang dijalankan masih bersifat sukarela dan belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Informan menyatakan:

“Arisan ini tidak ada unsur paksaan, hanya bagi yang mau saja.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses governance di tingkat masyarakat masih bersifat administratif dan belum mampu membangun gerakan kolektif dalam perubahan perilaku hidup sehat.

b. Dimensi Struktur

Pada dimensi struktur ditemukan adanya kelemahan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas dalam distribusi layanan kesehatan. Salah satu permasalahan yang ditemukan ialah tidak tersedianya Buku KIA khusus bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di UPT Puskesmas Pulau Kijang. Informan dari Dinas Kesehatan menyampaikan:

“Sebenarnya buku KIA khusus BBLR sudah disediakan oleh dinas, namun dari pihak puskesmas tidak ada yang datang mengambil ke kantor dinas.”

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme koordinasi vertikal antar lembaga kesehatan. Padahal bayi BBLR memerlukan pemantauan tumbuh kembang secara khusus untuk mencegah risiko stunting. Selain itu, struktur intervensi stunting masih didominasi oleh sektor kesehatan, sedangkan peran keluarga, khususnya ayah dan nenek, belum terintegrasi dalam program pemerintah. Padahal pengambilan keputusan terkait makanan anak di rumah lebih banyak dipengaruhi oleh anggota keluarga tersebut.

Salah satu ibu informan menyatakan:

“Kalau sama neneknya sering dibelikan jajan supaya tidak nangis. Kalau sama ayahnya, nangis sedikit langsung dibelikan makanan.”

Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengasuhan keluarga belum sejalan dengan struktur promosi kesehatan pemerintah.

c. Dimensi Kognisi dan Nilai-Nilai

Dimensi kognisi dan nilai menunjukkan bahwa rendahnya literasi gizi masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa anak yang kenyang dianggap sehat, tanpa memperhatikan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi. Budaya pengasuhan tradisional juga memengaruhi pola konsumsi anak. Orang tua dan keluarga cenderung memberikan makanan instan atau jajanan untuk menenangkan anak. Salah satu informan menyampaikan:

“Yang penting anak kenyang dan tidak rewel.”

Nilai budaya tersebut bertentangan dengan konsep gizi seimbang yang disosialisasikan pemerintah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya protein hewani, sayur, dan pola makan sehat menyebabkan praktik pemberian makan anak tidak sesuai dengan standar kesehatan.

d. Dimensi Organisasi dan Institusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penanganan stunting belum berjalan secara sinergis. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat masih memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan operasional.

Kader posyandu tidak hanya bertugas melakukan penimbangan balita, tetapi juga harus menjadi edukator, pencatat data, dan mediator sosial di masyarakat. Namun, keterbatasan pelatihan dan minimnya dukungan institusional menyebabkan proses edukasi stunting kurang maksimal.

Selain itu, koordinasi antar institusi juga belum efektif. Program penanganan stunting masih berjalan sektoral dan belum membentuk sistem kerja terpadu antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan lembaga sosial lainnya.

e. Dimensi Manajemen dan Kinerja

Secara umum, angka stunting di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan. Namun, pada tingkat implementasi masih ditemukan berbagai kendala dalam manajemen program. Salah satunya ialah rendahnya kepatuhan keluarga terhadap pola makan sehat.

Informan dari Puskesmas Pulau Kijang menyatakan:

“Anak-anak stunting di Kecamatan Reth lebih banyak mengonsumsi jajanan instan, makanan manis, mie instan, dan sering minum teh.”

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan posyandu dan sosialisasi belum berhasil mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Program masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan rutin, sementara perubahan perilaku keluarga belum menjadi indikator utama keberhasilan program.

f. Dimensi Kebijakan

Dari aspek kebijakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup lengkap terkait penurunan stunting. Namun implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan.

Kebijakan mengenai pola makan sehat dan sanitasi belum mampu diterapkan secara optimal karena kurangnya pengawasan serta minimnya mekanisme insentif dan sanksi bagi masyarakat. Kebijakan lebih banyak bersifat himbauan dibandingkan pengendalian perilaku secara nyata.

Selain itu, terjadi distorsi kebijakan di tingkat pelaksana, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Penyembunyian istilah “stunting” demi menjaga perasaan masyarakat menyebabkan tujuan edukasi tidak tercapai secara maksimal.

g. Dimensi Sektor

Penanganan stunting di Kecamatan Reteh masih menunjukkan dominasi sektor kesehatan tanpa dukungan maksimal dari sektor lain. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas gizi anak.

Salah satu informan menyampaikan:

“Penghasilan suami tidak menentu karena bekerja sebagai nelayan.”

Keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga sulit memenuhi kebutuhan protein hewani dan makanan bergizi. Di sisi lain, sektor sosial dan ekonomi belum memiliki program pemberdayaan yang terintegrasi untuk membantu keluarga berisiko stunting.

Program sanitasi juga belum berjalan maksimal karena rendahnya dukungan infrastruktur dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program jamban sehat.

h. Dimensi Etika, Akuntabilitas, dan Transparansi

Pada dimensi ini ditemukan adanya dilema antara etika sosial dan transparansi informasi. Kader posyandu berusaha menjaga perasaan masyarakat dengan tidak menyampaikan kondisi stunting secara langsung. Namun praktik tersebut justru menyebabkan masyarakat kehilangan hak memperoleh informasi kesehatan secara jelas.

Selain itu, akuntabilitas birokrasi juga masih lemah, terutama dalam distribusi layanan kesehatan dan pengawasan program. Tidak adanya sanksi terhadap kelalaian distribusi Buku KIA menunjukkan lemahnya tanggung jawab administratif dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa stunting di Kecamatan Reteh dipengaruhi oleh kombinasi faktor kesehatan, ekonomi, budaya, pola pengasuhan, komunikasi publik, dan lemahnya tata kelola lintas sektor. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan medis, tetapi harus melibatkan penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi gizi, serta koordinasi lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting oleh UPT Puskesmas Pulau Kijang pada Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Strategi percepatan penurunan stunting merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan masalah gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, sanitasi, pendidikan, ekonomi keluarga, serta perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi pemerintahan yang terdiri dari tujuan, lingkungan, pengarah, tindakan, dan pembelajaran.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah lokus stunting di Provinsi Riau. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, prevalensi stunting tahun 2022 sebesar

28,5% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 18,8%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Reteh dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, kader posyandu, serta masyarakat. Program yang dijalankan antara lain Gerakan Satu Hati Jilid I, Gerakan Satu Hati Jilid II, dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nisca Eriyanti Matondang, S.Tr.Gz selaku Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan: “Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pada tahun 2021 dilakukan penimbangan serentak melalui kegiatan Gerakan Satu Hati Jilid I. Kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Satu Hati Jilid II berupa pemberian bantuan kepada anak stunting seperti susu penambah berat badan dan pemberian makanan tambahan. Selanjutnya tahun 2023 sampai 2024 dilaksanakan program Bapak dan Bunda Asuh.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap melakukan penguatan strategi penanganan stunting berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya. Strategi tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan fokus pada pemantauan pertumbuhan anak dan pemenuhan kebutuhan gizi.

a. Tujuan Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Tujuan merupakan arah utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan strategi. Dalam penelitian ini, tujuan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target nasional sebesar 14%.

UPT Puskesmas Pulau Kijang bersama pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menurunkan jumlah anak stunting di Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi, sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui perbaikan sanitasi, pendampingan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisca Eriyanti Matondang, S.Tr.Gz menyatakan:

“Kabupaten Indragiri Hilir memulai upaya penurunan prevalensi stunting dari 28,5% pada tahun 2022 menjadi 18,8% pada tahun 2023 sebagai titik awal menuju target nasional.”

Penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan telah memberikan dampak positif, meskipun belum mencapai target maksimal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama kader Kelurahan Pulau Kijang yang menyatakan:

“Untuk stunting di kelurahan sini sudah mengalami turun naik, yang awalnya 37 anak pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 3 anak, namun pada tahun 2023 naik kembali menjadi 8 anak.”

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan stunting belum stabil sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Selain itu, tujuan program juga terlihat dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu ibu yang memiliki anak stunting mengatakan:

“Alhamdulillah sekarang pertumbuhan anak saya sudah mulai normal. Dulu anak saya kurang gizi, tapi pihak kecamatan dan kelurahan terus memberikan bantuan seperti susu penambah berat badan, makanan tambahan, dan pemantauan dari puskesmas.”

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa program pemerintah telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

Namun demikian, peneliti menemukan bahwa tujuan percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan kenaikan jumlah kasus stunting pada tahun 2023 di

Kecamatan Reteh. Hal ini menyebabkan Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani ditetapkan sebagai lokus stunting.

b. Lingkungan (Environment)

Lingkungan dalam strategi terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang mempengaruhi keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah kondisi geografis Kecamatan Reteh yang sulit dijangkau. Akses jalan yang rusak, berlumpur, serta jarak tempuh yang jauh menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah selaku Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Reteh menyatakan:

“Kendalanya ibu-ibu sulit datang ke posyandu karena lokasi jauh dan akses jalan susah. Banyak juga yang takut anaknya diimunisasi sehingga imunisasi anak tidak lengkap.”

Kemudian diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Nisca Matondang, S.Gz yang menyatakan:

“Kami terkendala jarak tempuh ke lokasi. Kadang pergi pagi pulang sudah sore karena akses jalannya lecak dan berlumpur.”

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kondisi jalan menuju Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani masih banyak mengalami kerusakan. Beberapa jembatan penghubung antar wilayah juga dalam kondisi hampir amblas. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bantuan gizi dan pelayanan kesehatan menjadi terhambat.

Selain faktor geografis, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu juga menjadi hambatan. Berdasarkan wawancara dengan kader posyandu mengatakan:

“Kalau cuaca hujan, ibu-ibu yang tinggal di parit bagian dalam tidak bisa datang ke posyandu.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan strategi percepatan penurunan stunting.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan internal berkaitan dengan kondisi dalam organisasi seperti sumber daya manusia dan pendanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edwin, SE mengatakan:

“Faktor internal kami itu kekurangan SDM kader. Kabupaten Indragiri Hilir ini luas sehingga proses pemantauan langsung masih kurang.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan dan kader menjadi hambatan dalam proses pendampingan keluarga berisiko stunting. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yeni Reska, S.Tr.Gz selaku petugas gizi UPT Puskesmas Pulau Kijang:

“Untuk SDM bagian gizi masih kurang karena di puskesmas ini hanya saya sendiri.”

Selain keterbatasan SDM, masalah pendanaan juga menjadi hambatan utama. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Madani menyatakan:

“Dana untuk kegiatan posyandu setiap bulan tidak ada dari pemerintah daerah, jadi saya menggunakan dana pribadi sebesar Rp50.000 setiap posyandu.”

Hal yang sama disampaikan oleh Lurah Pulau Kijang:

“Kegiatan posyandu dibantu dari dana pribadi lurah karena keterbatasan anggaran.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendanaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan posyandu dan pemberian makanan tambahan belum berjalan optimal.

c. Pengarahan (Direction)

Pengarahan merupakan upaya pemerintah dalam mengarahkan seluruh pihak untuk mencapai tujuan program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penelitian, pengarahan dilakukan melalui kebijakan, koordinasi, komunikasi, dan motivasi. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Selain itu, koordinasi dilakukan melalui mini lokakarya yang dilaksanakan setiap tiga bulan di tingkat kecamatan dan enam bulan sekali di tingkat kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan pihak kecamatan menyatakan:

“Kami rutin melakukan evaluasi bersama puskesmas dan pemerintah kelurahan terkait perkembangan kasus stunting.”

Namun, peneliti menemukan bahwa motivasi kepada kader dan masyarakat belum optimal karena belum adanya penghargaan khusus bagi desa atau kelurahan yang berhasil menurunkan angka stunting.

d. Tindakan (Actions)

Tindakan merupakan pelaksanaan nyata strategi percepatan penurunan stunting di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

1. Intervensi Spesifik

Intervensi spesifik dilakukan langsung oleh sektor kesehatan melalui:

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)
2. Pemeriksaan ibu hamil
3. Pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu
4. Pemberian ASI eksklusif
5. Pemberian makanan tambahan lokal
6. Kelas balita
7. Kelas kader posyandu

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni, S.Gz menyatakan:

“Kami melakukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendampingan anak stunting selama 90 hari berturut-turut.”

Program PMT lokal menjadi salah satu tindakan yang cukup efektif karena menggunakan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh masyarakat.

Kader posyandu juga menyampaikan:

“Setiap hari kami memberikan PMT kepada anak stunting dengan menu berbeda-beda.”

Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil juga dilakukan secara rutin untuk mencegah anemia dan risiko stunting pada bayi.

2. Intervensi Sensitif

Intervensi sensitif dilakukan melalui perbaikan sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta bantuan sosial kepada keluarga berisiko stunting. Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan lingkungan menyatakan:

“Kami melaksanakan program STBM, sosialisasi jamban sehat, dan pembentukan kader kesehatan lingkungan.”

Namun demikian, peneliti masih menemukan masyarakat yang belum menerapkan PHBS secara maksimal, seperti masih merokok di dalam rumah dan belum menggunakan jamban sehat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni mengatakan:

“Rata-rata anak yang berisiko stunting memiliki ayah yang merokok di dalam rumah.”

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat masih menjadi faktor penyebab stunting yang perlu mendapatkan perhatian serius.

c. Pembelajaran (Learning)

Pembelajaran merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan strategi yang telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan evaluasi secara rutin melalui audit kasus stunting dan mini lokakarya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edwin, SE menyatakan:

“Evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun melalui audit stunting semester I dan semester II.”

Kemudian Ibu Yeni, S.Gz juga mengatakan:

“Setiap bulan dilakukan evaluasi jumlah anak stunting sebelum lokakarya mini tiga bulan sekali.”

Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan kasus stunting dan mencari solusi bersama terhadap kendala yang dihadapi di lapangan. Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting menjadi salah satu hasil pembelajaran dari program sebelumnya. Program ini dinilai membantu kader dan masyarakat karena adanya dukungan langsung dari pemerintah kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan kader Kelurahan Madani mengatakan:

“Program Bapak/Bunda Asuh memberikan dampak positif karena adanya bantuan untuk kegiatan posyandu.”

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, strategi percepatan penurunan stunting oleh UPT Puskesmas Pulau Kijang telah berjalan cukup baik melalui kerja sama lintas sektor dan berbagai program intervensi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala geografis, keterbatasan SDM, rendahnya anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya posyandu, imunisasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dinas Kesehatan kabupaten Indragiri hilir adalah ;

1. Dikukuhkannya Bapak Bunda Asuh di Kecamatan Reteh untuk percepatan penurunan stunting sudah berjalan secara optimal dimana kader posyandu merasa terbantu dengan adanya program Bapak Bunda Asuh
2. Faktor yang menyebabkan stunting di Kecamatan Reteh berdasarkan sound governance terdapat pada dimensi proses yaitu komunikasi Dan partisipasi masyarakat Masih Kurang.

5. SARAN

Faktor yang mempengaruhi stunting di Kecamatan Reteg ini paling dominan pada dimensi proses yang mana komunikasi terkait stunting Masih Kurang dan partisipasi masyarakat Masih Kurang. Untuk itu penulits menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran kepada Kelurahan Ketika acara Bulacan posyandu Ada Bagan makanan bergizi yang cukup balita dan anak-anak dan orangtua termotivasi untuk datang keposyandu.
2. Kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten agar memperhatikan akses Geografia jalan untuk wilayah yang memiliki anak stunting agar akses mudah di jangkau oleh Kader.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Zuchri Dan Ritmon Amala. 2016. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, Xx (02) 262-277
- [2] Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik. Calpulus, Yogyakarta
- [3] Anam, Khoirul. 2019. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Di Kabupaten Jepara. *Journal Of Politic And Government Studier*, 8(3) 1-11.
- [4] Apriastini, Ni Komang Tri Dkk. 2024. Stunting Faktor Risiko, Diagnosis, Tatalaksana, Dan Prognosis. *Ganesha Medicina Journal*, 17-23.
- [5] Ardiansyah, Risnita, Dan M.Syahrani Jailani. 2023. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1-9.
- [6] Herdiansyah, Hasir. 2015. Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [7] Kumara, Dedek, 2018. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan, *Journal Of Government And Civil Society*, 2 (1) 63-87.
- [8] Mardikanto, Totok Dan Soebiato Poerwoko, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi. Alfabeta, Bandung.
- [9] Mandasari N. 2023. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah ; Sound Governance; Dynamic Governance; Dan Open Government. *Economics, Business, Management Dan Accounting Journal*. 3(1)
- [10] Rahayu, Atikah Dkk. 2018. Study Guide-Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Cv Mine, Yogyakarta
- [11] Rifatul, Qamariah. 2013. Motif Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Lansia. (1)3.
- [12] Izzuddin, Riyan, Putra Dan Agus Widiyarta. 2024. Strategi Pemerintah Desaa Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Sruni Kecamatan Gedagang Kabupateen Sidoarjo. *Neorepublica; Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(2).
- [13] Salmon, Hayati Sofia Dkk. 2022. Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe. *Jurnal Governance*. I (2)
- [14] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kebijakan. Alfabeta, Bandung.
- [15] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung
- [16] Trihono Dkk. 2015. Pendek (Stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Solusinya. Balitbangkes, Jakarta
- [17] Umairi, Arwis Dkk, 2021. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Umkm Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6 (3)
- [18] Wahyuningsih. 2017. Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 390-399.
- [19] Wulandary, RD. 2021. Perspektif Sound Governance Dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Kasus Pekerja Perempuan Domestic Woker. *Journal Of Governace And Administrative Reform*. 2(2)
- [20] Yusnina, Maisyaroh Dkk. 2025. Implementasi Program Bapakk Asuh Anak Stunting Untuk Percepatann Penurunan Stunting Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (Jpma)*